

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan 87,02% (Indonesia.go.id, 2023) penduduk beragama Islam, Indonesia menjadi negara dengan mayoritas umat Islam terbesar kedua di dunia setelah Pakistan. Selain itu, banyaknya masjid yang ada di Indonesia sangat mendukung aktivitas keagamaan, dimana fungsi masjid bukan hanya untuk beribadah tetapi juga dipergunakan untuk berbagai aktivitas umat Islam di berbagai bidang.

Masjid adalah lembaga keagamaan Islam yang merupakan organisasi publik dengan tujuan bukan untuk memperoleh laba, atau biasa dikenal sebagai organisasi non profit (Oktavani, 2019). Dalam menyusun laporan keuangan, bendahara masjid bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan kepada donatur dan pengurus organisasi (Octisari et al., 2021). Kinerja organisasi dapat dilihat dari catatan keuangan yang disusun dengan baik.

Lemahnya teori dan praktik akuntansi dalam pengelolaan keuangan masjid serta rendahnya pengetahuan pengurus masjid terkait akuntansi menimbulkan masalah pada kualitas catatan keuangan masjid. Penelitian sebelumnya mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan masjid masih rendah, dalam penelitian Dewantari & Pardi (2022) menemukan bahwa setiap pengeluaran dan pendapatan di Masjid Darul Falah Gentan Sukoharjo masih dicatat manual pada jurnal perbendaharaan harian. Laporan terkait dana yang telah dicatat tidak ditempel pada papan informasi yang tersedia agar jemaah dapat mengetahui langsung mengenai catatan dana yang dikelola masjid. Hasil yang sama n pada Masjid Abu Dzar Al-Ghifari (Mahardika et al., 2022) yang masih



melakukan pencatatan secara sederhana dengan mencatat laporan arus kas saja. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai sistem pencatatan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Taufikkurrohman & Wibowo (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap motivasi berdonasi yang mengindikasikan bahwa ketika akuntabilitas diterapkan maka motivasi berdonasi meningkat. Ketika masjid menerapkan akuntabilitas dalam bentuk catatan keuangan atau menyediakan sistem informasi keuangan kepada jemaah, maka kecenderungan berdonasi ke masjid meningkat. Dari penelitian ini pengurus masjid dituntut agar dapat menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangannya.

Rendahnya akuntabilitas laporan keuangan masjid menyebabkan penurunan kepercayaan donatur terhadap pengelolaan keuangan masjid. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati (2023) di Masjid Ad Dua Way Halim Bandar Lampung menunjukkan terjadi penurunan donasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dikarenakan masjid belum akuntabel dalam menyajikan laporan keuangannya. Hasil yang sama juga ditemukan pada Masjid Hurriyah Adlin (Tasmiah et al., 2024) yang menunjukkan dari tahun 2022 hingga tahun 2023 terjadi penurunan donasi. Penurunan minat masyarakat dalam berdonasi di Masjid Hurriyah Adlin disebabkan oleh faktor kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana masjid, karena masjid tidak terbuka dalam mengelola dananya. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berdampak signifikan pada minat masyarakat untuk berdonasi di Masjid Hurriyah Adlin.

Kepercayaan masyarakat akan meningkat dan semakin termotivasi untuk berdonasi ke masjid apabila masjid akuntabel dalam menyajikan laporan keuangannya. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Fahrezi (2022) di Masjid Al-Firdaus Medan Tenggara VII yang menunjukkan pertumbuhan donasi mengalami



peningkatan dan fluktuasi yang baik dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif baik secara parsial dan simultan terhadap tingkat kepercayaan donatur. Tingkat kepercayaan donatur terhadap akuntabilitas sebesar 72,8% sebagai hasil dari laporan keuangan yang akuntabel di Masjid Jamik Medan VII Medan. Dalam penelitian ini tingkat kepercayaan donatur memiliki korelasi yang kuat dengan akuntabilitas.

Menurut Ansahrizal & Sihotang (2023) masjid wajib membuat laporan keuangan sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menerangkan pentingnya mencatat semua transaksi dalam bermuamalah sebagai bagian dari sektor publik yang merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP).

Akuntabilitas adalah sarana untuk bertanggung jawab atas setiap kegagalan atau keberhasilan dalam memenuhi misi organisasi untuk mencapai target dan tujuan menggunakan media pertanggungjawaban periodik (Mardiasmo, 2006). Dalam hal ini masjid harus memperbaiki sistem administrasi dan publikasi laporan keuangan. Informasi keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk kepentingan organisasi. Namun sebagian masjid masih menganggap tabu praktik akuntansi dalam mengelola keuangan masjid, bahkan pengurus masjid tidak mengetahui bagaimana menggunakan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan masjid.

Populasi umat Islam dan masjid di Indonesia sangatlah banyak, jaminan akan ketersediaan dana pun selalu ada. Akan tetapi, pengelola masjid sering kali tidak memiliki pengetahuan dalam mengalokasikan dana dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, masjid memerlukan alternatif pengelolaan keuangan yang efisien



in sumber pendapatan, identifikasi aktivitas dan laporan keuangan yang berdasarkan anggaran dan aktivitas masjid.

asjid biasanya hanya menyajikan catatan keuangan yang mencakup

pengeluaran kas dan penerimaan yang diperoleh dari jemaah saja. Mayoritas masjid kesulitan dalam mengelola sumber daya yang diperoleh dari masyarakat dengan baik. Kurangnya kesadaran penerapan standar akuntansi dalam pengelolaan keuangan masjid dikarenakan kendala manajemen masjid yang tidak memiliki latar belakang keuangan dan kapasitas organisasi pengurus masjid yang masih relatif rendah (Oktavani, 2019).

Jusnawati & Mardiansyah (2022) menjelaskan pentingnya laporan keuangan masjid sebagai bentuk tanggung jawab atas dana yang diamanahkan ke masjid dengan menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) untuk menyusun laporan keuangan organisasi non profit. Publikasi laporan keuangan organisasi, akan meningkatkan kepercayaan publik dan menghasilkan keuntungan timbal balik dari sumber daya yang dipercayakan (Widhawati et al., 2021).

Akuntansi syariah adalah akuntansi yang dilihat dari sudut pandang Islam (Rohemah & Alim, 2022). Prinsip akuntansi syariah terdiri dari beberapa aspek, yaitu: tanggung jawab, kebenaran, serta keadilan. Dalam mengelola keuangan masjid harus memperhatikan prinsip akuntansi syariah yang menekankan nilai tanggung jawab, kebenaran, serta keadilan dalam pengelolaan dana umat untuk menjaga integritas pengurus masjid dan menjamin dana umat digunakan sesuai dengan tujuan yang diamanahkan.

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros, terdapat berbagai masjid dengan ukuran dan kapasitas yang berbeda. Beberapa masjid seperti Masjid Al Markaz Al Islami memiliki sumber daya yang lebih besar untuk mengelola laporan keuangan dengan baik, dengan jumlah jemaah yang besar dan sumber dana yang



nyak, sedangkan masjid dengan kapasitas yang lebih kecil seperti Masjid d kemungkinan memiliki tantangan yang berbeda dalam pengelolaannya. Perbandingan kedua masjid ini akan memberikan gambaran

mengenai akuntabilitas laporan keuangan yang diterapkan di kedua masjid.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Masjid Al Markaz Al-Islami dan Masjid Al Fayyad di Kabupaten Maros”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana akuntabilitas laporan keuangan Masjid Al Markaz Al-Islami dan Masjid Al Fayyad di Kabupaten Maros.
2. Bagaimana perbandingan kesesuaian dengan standar ISAK 35 pada praktik pelaporan keuangan di Masjid Al Markaz Al-Islami dan Masjid Al Fayyad di Kabupaten Maros.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis akuntabilitas laporan keuangan Masjid Al Markaz Al-Islami dan Masjid Al Fayyad di Kabupaten Maros.
2. Menganalisis perbandingan kesesuaian dengan standar ISAK 35 pada praktik pelaporan keuangan antara Masjid Al Markaz Al-Islami dan Masjid Al Fayyad di Kabupaten Maros.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, yaitu dengan meningkatkan pemahaman mengenai akuntabilitas laporan keuangan pada organisasi nirlaba, khususnya

masjid. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan masjid.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu praktisi khususnya para pengurus masjid dalam memahami standar akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid untuk meningkatkan kepercayaan jemaah terhadap pengelolaan keuangan masjid. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan sumber penelitian lebih lanjut mengenai akuntabilitas laporan keuangan masjid.



BAB II

AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID

2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan organisasi dalam meraih tujuan serta target yang telah ditentukan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban periodik (Mardiasmo, 2006). Sasaran pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan ketentuan yang mencakup pengumpulan dan pengeluaran dana organisasi.

Dalam bahasa Inggris *accountability* atau akuntabilitas memiliki makna yaitu keadaan yang menjelaskan tentang kinerja pencatatan dan pelaporan keuangan. Akuntabilitas melibatkan manajemen entitas yang bertanggung jawab atas sumber daya yang diberikan. Menurut Khairaturrahmi & Ibrahim (2018) akuntabilitas adalah tanggung jawab pemegang amanah untuk mengungkapkan, menyajikan, dan melaporkan setiap aspek kegiatan organisasi kepada pemberi amanah.

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari penerapan prinsip akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan organisasi. Dengan membangun kepercayaan publik, masyarakat dapat terdorong untuk berpartisipasi langsung dalam tata kelola organisasi. Tujuan utama dari penerapan prinsip akuntabilitas adalah untuk menciptakan akuntabilitas kinerja keuangan organisasi yang baik sebagai syarat terciptanya pengelolaan keuangan yang terpercaya. Menurut Syah (2014)

akuntabilitas terdiri dari lima indikator, yaitu:



1. Mempunyai SOP (*Standard Operating Procedure*)

SOP adalah pedoman untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang berisikan langkah-langkah atau instruksi mengenai kegiatan rutin organisasi yang harus dipatuhi oleh siapa saja yang bekerja di dalam organisasi. Untuk menghindari praktik yang tidak sesuai prosedur serta penyalahgunaan dana, semua kegiatan pengelolaan organisasi harus dilakukan sesuai dengan SOP.

2. Mempunyai sistem pengawasan

Sistem pengawasan berguna untuk mengidentifikasi setiap bagian yang ada di organisasi. Segala aktivitas dan transaksi keuangan dicatat dan diperiksa melalui sistem pengawasan untuk memastikan hanya pihak berkepentingan yang dapat mengakses data keuangan.

3. Adanya mekanisme pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan memerlukan mekanisme pertanggungjawaban untuk memastikan semua kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

4. Terdapat laporan tahunan

Adanya laporan tahunan memberikan gambaran mengenai keadaan keuangan organisasi selama periode akuntansi. Tujuan dari laporan tahunan adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan selama periode akuntansi.

5. Terdapat mekanisme hukuman dan hadiah

Mekanisme ini dirancang untuk mengevaluasi kinerja individu dalam pengelolaan keuangan serta bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Mekanisme hukuman berupa konsekuensi apabila seseorang tidak mengerjakan tugas sesuai dengan SOP atau melanggar SOP, sedangkan

hadiah berupa penghargaan apabila seseorang melakukan tugasnya dengan SOP.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat empat dimensi akuntabilitas publik,



yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran adalah bagaimana organisasi dapat menghindari penyalahgunaan jabatan untuk menjamin praktik organisasi yang baik dengan pengawasan serta pemeriksaan untuk menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam penyelenggaraan organisasi. Akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan dana publik. Kepatuhan hukum pada penyelenggaraan pelayanan publik mutlak untuk menilai tingkat akuntabilitas organisasi.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses merupakan akuntabilitas pada pelaksanaan prosedur organisasi seperti dalam prosedur administrasi, sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Akuntabilitas proses menjelaskan kesesuaian implementasi kegiatan organisasi dengan rencana awal serta kegagalan atau keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah disepakati bersama.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan bagaimana organisasi merencanakan program visi dan misi organisasi. Dalam perencanaan ini, organisasi mempertimbangkan apakah visi dan misi organisasi dapat dicapai, dan apakah alternatif yang dipertimbangkan dapat memberikan hasil optimal dengan biaya rendah. Diperlukan laporan hasil kegiatan organisasi untuk mengetahui realisasi sumber daya yang digunakan dalam kegiatan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan



akuntabilitas kebijakan bukan hanya mencakup tanggungjawab finansial dan anggaran keuangan saja, tetapi juga tanggungjawab atas segala kegiatan organisasi.

2.2 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam perspektif Islam bukan hanya ditujukan pada manusia tetapi juga berupa tanggung jawab kepada Allah SWT, dimana manusia harus bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan kepada mereka. Akuntabilitas dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Mardiasmo, 2004): akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal berupa tanggung jawab kepada Allah SWT dengan menjalankan syariah Islam dalam menjaga amanah dari Allah SWT. Akuntabilitas horizontal berupa tanggung jawab atas hubungan organisasi dengan masyarakat dan lingkungan, akuntabilitas pada masyarakat berupa laporan keuangan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan sedangkan akuntabilitas pada lingkungan berupa laporan penggunaan sumber daya lingkungan yang digunakan dalam kegiatan organisasi.

Menurut Khadaffi (2017) akuntansi syariah terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban yang paling tinggi adalah tanggungjawab kepada Allah SWT. Akuntabilitas kepada Allah SWT dilakukan dengan menjalankan syariah Islam dalam mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Akuntansi memfokuskan prinsip pertanggungjawaban pada dua hal yaitu, akuntabilitas dan pelaporan.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berarti setiap kegiatan bermuamalah harus dicatat dengan baik dan benar. Akuntansi syariah bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi baik



perangan maupun bagi masyarakat luas.

Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran berarti semua kegiatan pelaporan dan pencatatan harus

sesuai dengan nominal sebenarnya untuk menjaga nilai-nilai kebenaran dalam mengukur, mengakui dan melaporkan. Segala bentuk pendapatan maupun pengeluaran harus disertai dengan bukti transaksi untuk mencegah adanya kecurangan.

Akuntabilitas dalam perspektif Islam mengharuskan laporan keuangan entitas syariah mengandung empat sifat nabi Muhammad SAW supaya laporan keuangan yang disajikan dapat dikatakan akuntabel dan diakui sebagai laporan horizontal dan vertikal. Konsep akuntabilitas dalam perspektif Islam memiliki hubungan erat dengan sifat nabi Muhammad SAW yang terdiri dari (Antonio, 2002):

1. *Shidiq* (Jujur)

Kejujuran mutlak dilakukan dalam menyajikan laporan keuangan. Sifat ini mencerminkan integritas, sehingga dalam menyajikan laporan keuangan harus menanamkan sifat integritas yang menghindari segala unsur penipuan dalam pencatatan laporan keuangan.

2. Amanah

Amanah senantiasa berkaitan dengan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab atas laporan keuangan yang menggunakan prinsip akuntansi syariah. Masjid adalah organisasi nirlaba yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan dana publik, oleh karena itu kepercayaan ini harus dijaga dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Fathanah

Fathanah berarti cerdas dan memiliki pengetahuan yang luas. Dalam a keuangan organisasi, fathanah mencerminkan kesadaran pengurus i tugas yang dikerjakan akan bernilai ibadah apabila dijalankan sesuai aturan yang ada. Pengurus organisasi harus memiliki pengetahuan dalam



memahami tugas dan kewajibannya dalam mengelola keuangan, agar laporan keuangan yang dicatat benar dan tanpa kekeliruan.

4. Tabligh

Tabligh berarti benar. Laporan keuangan disajikan dengan objektif tanpa ada yang disembunyikan dan menekankan pada kejujuran informasi yang disampaikan.

Beberapa nilai akuntabilitas dalam perspektif Islam menurut Nasiruddin et al., (2018) terdiri dari:

1. Mengutamakan kesejahteraan umat

Semua kegiatan yang dijalankan organisasi wajib mengutamakan kesejahteraan umat sebagai bentuk amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia di muka bumi.

2. Adil

Segala kegiatan yang dijalankan organisasi harus dilakukan dengan adil. Masjid adalah organisasi publik yang bergantung pada kepercayaan masyarakat dalam menghimpun dana, oleh sebab itu pengelolaan keuangan entitas syariah wajib dilaksanakan dengan adil.

3. Ikhlas dalam mempertanggungjawabkan tugasnya

Pengelola masjid dalam melaksanakan tugas yang diberikan wajib dilakukan dengan ikhlas dan sabar, semata-mata untuk meraih ridho Allah SWT dan tidak mengharapkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

4. Adanya catatan dan laporan

Catatan dan laporan keuangan harus dilakukan secara tertulis, memadai dan diakses oleh masyarakat yang membutuhkan laporan keuangan. Pencatatan dilakukan sebagai bukti terjadinya transaksi untuk menghindari penyalahgunaan dana. Suatu informasi dianggap akuntabel apabila



disertai dengan bukti yang objektif.

Menurut Chapra (2000) Islam memiliki tiga konsep dasar tentang kehidupan yang terdiri dari tauhid, khalifah dan keadilan. Di mana konsep ini mencerminkan nilai akuntabilitas Islam.

1. Tauhid

Salah satu pilar akuntabilitas Islam adalah tauhid, dengan tauhid manusia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah SWT. Dengan kesaksian ini, organisasi wajib mematuhi syariah Islam dalam menjalankan organisasinya. Allah adalah pemilik alam semesta beserta isinya, manusia hanya diberi hak untuk mengelola titipan Allah, oleh karena itu organisasi harus memiliki kesadaran terhadap sumber daya yang digunakan karena kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemahaman mengenai tauhid akan membawa organisasi pada pola akuntabilitas yang menganggap Allah sebagai *principal*, bahwa segala aktivitas organisasi merupakan ibadah untuk meraih ridho Allah SWT.

2. Khalifah

Sebagai pemilik alam semesta, Allah SWT menetapkan manusia sebagai *Khalifah* di muka bumi bertanggung jawab untuk memelihara bumi serta menyebarkan kebaikan sesuai petunjuk Allah SWT. Petunjuk yang diberikan terdapat pada syariah yang mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Konsep khalifah berarti manusia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama melainkan juga bertanggungjawab kepada Allah SWT sebagai wali Allah di bumi.



ilan

eadilan dalam Islam adalah hukum dan dasar nilai yang terdiri dari

syariah dan akhlak. Penghapusan riba dalam ekonomi Islam bertujuan

untuk mencipta keadilan. Allah senantiasa memerintahkan manusia untuk berperilaku adil dan mengecam perbuatan zalim. Dalam konteks akuntabilitas Islam organisasi dikehendaki untuk tidak berbuat zalim dan berperilaku adil tanpa membeda-bedakan.

2.3 Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2015, laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan (Sujawerni, 2019). Laporan keuangan adalah hasil dari proses pengikhtisaran dan pencatatan transaksi yang dipergunakan untuk menyajikan catatan keuangan dan kinerja organisasi.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan program dibutuhkan pengawasan dan penilaian kriteria, aturan dan standar sebagai indikator keberhasilan kegiatan organisasi.

Laporan keuangan disajikan dengan tujuan untuk memberikan data keuangan terkait kinerja organisasi yang digunakan pengguna laporan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat (Sitompul et al., 2015). Laporan keuangan memberikan gambaran atas pertanggungjawaban sumber daya yang dikelola organisasi. Setelah membaca laporan keuangan, pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi serta memperkirakan dampak ekonomi pada kinerja organisasi.

Menurut (Sitompul et al., 2015) karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dipahami

Kualitas utama laporan keuangan adalah terdapat kemudahan dalam memahami laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dianggap memahami



ktivitas bisnis, akuntansi dan ekonomi yang disajikan dalam laporan.

'an

formasi pada laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan

pengguna laporan keuangan agar bermanfaat untuk pengambilan keputusan keuangan.

3. Dapat dibandingkan

Pengguna laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan yang disajikan untuk mengetahui tren situasi dan kinerja keuangan.

Penyajian laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen berikut , yaitu (Pradana, 2021):

1. Neraca (*balance sheet*)

Neraca atau laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang dibuat pada periode akuntansi yang menggambarkan keadaan organisasi pada akhir periode akuntansi. Neraca terdiri dari:

- a. Aset. Aset dibagi menjadi aset lancar, aset tetap dan aset lain-lain. Aset lancar berupa sumber ekonomi yang dimiliki organisasi. Aset tetap adalah aset organisasi dengan tingkat ketidakpastian mengenai manfaat masa depan. Aset lain-lain terdiri dari pos yang tidak termasuk dalam aset lancar maupun aset tetap.
- b. Kewajiban (*Liabilities*) adalah tanggungjawab yang wajib dipenuhi organisasi pada masa sekarang sebagai dampak dari kejadian masa lalu.
- c. Ekuitas merupakan hak residu pemilik organisasi atas kekayaan organisasi setelah dikurangi semua kewajiban.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran selama periode akuntansi. Laporan laba rugi menunjukkan kinerja

organisasi, yang menunjukkan selisih antara pendapatan dan biaya diperoleh organisasi.



3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar selama periode akuntansi. Laporan ini dikategorikan berdasarkan kegiatan yang menyebabkan arus kas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan saldo akun ekuitas dari awal periode akuntansi.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan yang membantu pengguna laporan memahami informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

2.4 Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah menyajikan laporan posisi dan kinerja keuangan entitas syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas syariah kepada pengguna laporan keuangan syariah (Sitompul et al., 2015). Adapun Komponen laporan keuangan syariah terdiri dari:

1. Neraca Laporan Posisi Keuangan

Laporan keuangan entitas syariah menyajikan aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang secara terpisah. Aset disajikan berdasarkan ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Entitas syariah mengungkapkan jumlah aset diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan setelah 12 bulan terhitung dari tanggal neraca.



an Laba Rugi

aporan laba rugi entitas syariah terdiri dari unsur kinerja keuangan untuk

ijajar dengan memperhatikan faktor hakikat, materialitas, dan

komponen pendapatan serta beban. Pendapatan tidak halal tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi entitas syariah maupun laba rugi konsolidasi entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Namun informasi ini disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas entitas syariah menyajikan komponen laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi bersih pada periode berjalan, setiap pos pendapatan dan beban berdasarkan PSAK yang diakui secara langsung.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas entitas syariah menyajikan penerimaan kas dan pengeluaran kas serta setara kas selama periode akuntansi.

5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan sumber dan penyaluran zakat entitas syariah terdiri dari sumber dana, penggunaan dana, serta saldo dana zakat yang belum tersalurkan pada tanggal tertentu.

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan entitas syariah terdiri dari sumber, penggunaan dana kebajikan serta saldo dana kebajikan yang belum tersalurkan pada tanggal tertentu.

7. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Investasi terikat bersumber dari pemilik dana yang dikelola oleh bank.

2.5 Laporan Keuangan Masjid

Prinsip akuntabilitas terhadap jemaah dan donatur tercermin dari laporan yang disajikan masjid kepada publik. Dalam hal ini masjid masih perlu perbaikan administrasi termasuk publikasi laporan keuangan. Dengan peningkatan kebutuhan akan akuntabilitas publik, maka



transparansi informasi keuangan organisasi semakin penting.

Masjid adalah organisasi nirlaba yang tujuannya mengutamakan kepentingan publik daripada perolehan laba dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba adalah menyajikan informasi yang relevan terkait kegiatan organisasi.

Laporan keuangan masjid terdiri dari 5 (lima) komponen laporan keuangan, yaitu (Sitompul et al., (2015) :

1. Aset

Aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu organisasi sebagai hasil dari kejadian masa lalu dan keuntungan finansial yang diharapkan di masa depan. Aset terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset tetap dibagi menjadi 2, yaitu: aset tetap tidak terikat tanpa pembatasan dan aset tetap pembatasan.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah kewajiban masa lalu yang diubah menjadi kewajiban masa kini.

3. Net Aset (Ekuitas)

Ekuitas adalah klaim yang tersisa terhadap aset setelah dikurangi semua kewajiban.

4. Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi yang meningkatkan nilai bersih aset menjadi hak partisipasi. Sumber pendapatan masjid berasal dari sumbangan ke masjid serta dana kegiatan yang diadakan masjid. Pendapatan masjid berasal dari:

a. Pendapatan zakat. Zakat merupakan kewajiban atas harta yang



alurnya diprioritaskan berdasarkan realitas keberadaan mustahik. Pendapatan Infaq. Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Pendapatan infaq

adalah dana yang diterima masjid dari kegiatan usaha masjid.

- c. Pendapatan Sedekah. Sedekah adalah sumbangan sukarela yang tidak memiliki persyaratan tertentu. Sedekah berasal dari donasi jemaah baik dari kotak amal maupun sumbangan rutin.
- d. Pendapatan Wakaf. Wakaf adalah proses pengalihan aset pribadi kepada organisasi untuk memberikan manfaat kepada publik yang semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Wakaf masjid dapat berupa tanah, bangunan dan kendaraan serta wakaf tidak tetap seperti uang atau wakaf produktif.

5. Beban

Beban yaitu penurunan manfaat ekonomi yang menyebabkan turunnya nilai aset menjadi partisipasi lain dalam operasional perusahaan. Beban masjid berasal dari:

- a. Beban pegawai berupa pengeluaran yang dibayarkan kepada pegawai yang bertugas mengelola masjid.
- b. Beban barang berupa pengeluaran yang dibayarkan untuk membeli keperluan operasional masjid.
- c. Beban jasa berupa pengeluaran rutin terkait penyediaan layanan jasa untuk operasional masjid.
- d. Beban pemeliharaan berupa pengeluaran rutin untuk pemeliharaan aset untuk memastikan kondisi aset dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menurut Siregar (2018) dalam Najmudin & Bayinah (2022), laporan keuangan masjid dapat digunakan untuk tujuan berikut:

1. Pengurus masjid dapat menggunakan laporan keuangan untuk memutuskan



buat program baru untuk menggantikan program yang kurang efektif
 pengurus masjid dapat menggunakan laporan keuangan untuk pembuatan
 laporan periode berikutnya

3. Pengurus masjid dapat menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan organisasi untuk melakukan penggantian pengurus yang dinilai tidak memadai.
4. Pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan untuk mengetahui kinerja organisasi.

2.6 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan ISAK 35

Pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang sebelumnya diatur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45), yang dimutakhirkan pada tanggal 1 Januari 2020. Terdapat perbedaan antara PSAK 45 dan ISAK 35 yaitu pada klasifikasi aset neto, di mana penggabungan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto pembatasan (*with restrictions*) dengan tujuan mengurangi kompleksitas dan aset neto tidak terikat tanpa pembatasan (*without restrictions*) untuk memberikan pemahaman yang lebih baik serta manfaat yang lebih besar bagi pengguna laporan keuangan entitas nirlaba (Isak et al, 2021).

Menurut ISAK 35, organisasi nirlaba perlu menyusun 5 (lima) jenis laporan keuangan yang terdiri dari (Setiadi, 2021):

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan ini menyajikan data tentang aset, kewajiban, dan aset bersih. Pengungkapan laporan posisi keuangan memungkinkan donatur dan pihak berwenang untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam menjalankan kegiatannya.

2. Laporan Penghasilan Komprehensif



Laporan ini menjelaskan bagaimana penghasilan dan beban entitas

Sumber penghasilan masjid dapat berasal dari:

pemerintah merupakan dana yang telah dianggarkan pemerintah untuk

pembangunan masjid

- b. Dana tetap merupakan sumbangan rutin yang diperoleh dari donatur tetap yang menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah.
- c. Dana Bebas merupakan sumbangan dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari jamaah di lingkungan sekitar masjid.
- d. Dana kotak amal merupakan sumbangan dari jemaah yang bersedekah ke kotak amal masjid yang ditempatkan di pusat keramaian atau di pintu masjid.

3. Laporan Aset Neto

Laporan aset neto menyajikan informasi aset neto baik tanpa pembatasan maupun aset neto dengan pembatasan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan ini digunakan pengguna laporan sebagai dasar penilaian kinerja masjid dalam menghasilkan kas, setara kas dan penggunaan arus kas.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan ini menyajikan rincian catatan atas laporan keuangan yang disajikan masjid.

